



Dana Desa Rawan Pelanggaran Administrasi

■ Tia Desa Dapat Rp 1,5 Miliar

PONTIANAK, TRIBUN - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengharapkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan dana desa. Hal ini disampaikan Anggota VI BPK RI Bahrullah Akbar.

"Hari ini kita undang bupati dan instansi terkait supaya ada perencanaan yang sinergi antara pemerintah desa, kabupaten dan provinsi," kata Bahrullah di sela Focus Group Discussion (FGD) Pemantapan Pengelolaan Dana Desa di Hotel Mercure, Senin (3/4).

Dia mengatakan BPK RI terus mengingatkan kepada Pemda memiliki tanggung jawab terutama dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah desa terutama dalam penyampaian laporan penggunaan dana desa, yang dirasa masih memiliki berbagai kelemahan.

"Evaluasi tiga tahun pelaksanaan cukup bagus ya. Tapi pasti ada kelemahan, kekurangan itu pasti," ujarnya.

Dikatakannya dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban masih banyak

ditemukan pelanggaran administratif. Bahkan ada pula dugaan penyalahgunaan yang dilaporkan ke aparat kepolisian.

"Yang masuk ke aparat penegak hukum juga ada. Tapi kan masih sebagian kecil. Termasuk di Kalbar ada tapi tidak besar," katanya.

Pengawasan sendiri terus berkoordinasi dengan dan bersinergi ditingkat daerah seperti inspektur, agar lebih khusus efektif dalam pengawasan. "Kita juga metode tersendiri dalam mengaudit," ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR RI, Sukiman mengungkapkan, jumlah dana desa pada 2019 ditargetkan mencapai sekitar Rp 111 triliun. Sukiman merincikan peningkatan dana desa sangat luar biasa secara Nasional dan bertahap dilakukan. Pada 2015 misalnya berkisar Rp 20,7 triliun pada APBN Perubahan.

Kemudian lanjutnya pada 2016 mengalami peningkatan yang luar biasa yakni mencapai sekitar Rp 47,6 triliun dan pada 2017 mencapai kisaran Rp 80 triliun.

"*Insy Allah* pada 2018 akan mencapai Rp 103 triliun dan 2019 Rp 111 triliun. Jadi target Rp 1,5 miliar



TRIBUN/ZUL

PEMANTAPAN DANA DESA - Anggota BPK RI berikan pemahaman dalam FGD Pemantapan Pengelolaan Dana Desa, Senin (3/4).

satu desa minimal sudah bisa terpenuhi," ungkapnya.

Sukiman menambahkan berkenaan dengan ini DPR sebagai fungsi legiasi dan penganggaran, tidak hanya membentuk UU tapi bagaimana ini menjadi komitmen mendorong ini bisa terwujud.

Sukiman berharap seiring peningkatan Dana Desa pemerintah pusat, dapat dikelola oleh desa secara akuntabel dan transparan.

"Oleh karena saya pikir secara rinci dan teknis kita sedang berdiskusi terus dengan mitra kita terkait

persoalan pengelolaan keuangan ini. Maka kita diskusi bersama Bupati dan jajaran, dalam rangka mendengar apa yang menjadi persoalan desa ini," ujarnya.

Namun seperti diketahui lanjutnya secara umum persoalan dana desa masih berkaitan dengan pelaporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa. "Kendalanya memang masih menyangkut sumber daya manusia aparat desa. Apalagi laporan pertanggung jawaban ini semua menjadi objek dalam pemeriksaan," ujarnya. (zul)